**LAPORAN AKHIR KEGIATAN**

**HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI REFORMASI REGULASI TERINTEGRASI**

**KEGIATAN**

**SEMINAR NASIONAL “ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045”**

**UNIT STAF AHLI MENTERI PPN BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

**TAHUN ANGGARAN**

**2018**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**
  2. **Tujuan**
  3. **Ruang Lingkup**
  4. ***Output*/Keluaran**

**BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

**BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN**

* + 1. TOR dan RAB Kegiatan
    2. SK Tim Pelaksana Kegiatan
    3. Hasil Kegiatan (Makalah 10 finalis CFP)
    4. Dokumentasi (pra-seminar dan pelaksanaan seminar)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam konteks global, telah digagas 4 (empat) Pilar Pembangunan Indonesia 2045 yang menjadi acuan dalam mencapai kemajuan dan pencapaian pembangunan jangka panjang nasional Indonesia yakni: 1). Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, 2). Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, 3). Pemerataan Pembangunan, dan 4). Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. [[1]](#footnote-1)

Pemantapan 4 (empat) pilar tersebut didasarkan oleh alasan-alasan dan strategi-strategi untuk mencapai visi bersama Indonesia 2045. Konteks pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termaksud dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, sebab apabila kualitas sumber daya manusia (yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) rendah, maka rendah pula produktivitas dan daya saing perekonomian nasional.[[2]](#footnote-2) Sehingga, kebutuhan untuk memupuk pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, salah satunya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan menjadi tantangan yang kemudian akan dihadapi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai subyek *(human capital),* obyek *(human resources),* dan penikmat pembangunan.[[3]](#footnote-3) Tidak hanya itu, aspek global lainnya adalah pembangunan ekonomi, dimana sejak gagalnya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang kedua (1997) akibat krisis, mendorong Indonesia untuk melalukan penyusunan kembali langkah-langkah pembangunan yang baru. Krisis yang telah meluluh-lantakkan perekonomian Indonesia telah membuka mata betapa pentingnya membangun dan lebih memperkuat fondasi perekonomian agar berdaya tahan tinggi.[[4]](#footnote-4) Aspek tersebut kemudian mendasari dibutuhkannya strategi dan perencanaan yang lebih inovatif, guna tercapainya fokus pembangunan perekonomian dengan mengembangkan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Dalam ranah hukum dan politik, sejak momentum pergantian rezim Orde Baru pada Mei 1998, persoalan demokratisasi adalah isu utama kehidupan politik nasional. Kondisi seperti ini jelas memerlukan sistem politik yang kuat dan kepemimpinan yang bersih, agar mampu memberikan arah yang sesungguhnya dari reformasi dan demokratisasi Indonesia. Didasari hal tersebut, struktur ketatanegaraan Indonesia kemudian mengalami perubahan besar dengan mengimplementasikan sistem *check and balance* yang menuntut pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang dilandaskan pada konsep nomokrasi dan demokrasi, sehingga kemudian diperlukan dukungan sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Pelaksanaan pembangunan bidang hukum mau tidak mau harus melalui proses perencanaan yang matang sehingga memudahkan penerapan, penegakan dan evaluasi pelaksanaannya,[[6]](#footnote-6)6 guna mencapai tujuan dari visi Indonesia yang berfokus pada Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi dapat tercapai secara maksimal.

Untuk menghadapi tantangan dari beberapa isu nasional tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengedepankan salah satu aspek untuk menjaga kualitas produk perencanaan, yakni dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan.[[7]](#footnote-7)7 Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan mengemukakan pendapat penting diterapkan guna mendapatkan inovasi dan inspirasi dari rakyat yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan, serta menjadi penentuan nasib bangsa kedepannya.[[8]](#footnote-8)8 Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada banyak masukkan dari rakyat, dan pemimpin juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan rakyatnya, sehingga diharapkan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya.[[9]](#footnote-9) Berkaitan dengan isu dan pemahaman permasalahan di atas, pembahasan secara lugas tentang Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan; dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan perlu mendapatkan masukan, solusi dan strategi komprehensif serta *visible* dari berbagai pihak (akademisi, praktisi, pemangku kepentingan). Dengan demikian, pemerhati pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang terang dan berimbang dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kehendak penyelenggara negara.

Penyelenggaraan negara (*governance*) pada dasarnya meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu perumusan kebijakan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kegiatan lain yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut betul-betul diarahkan untuk mewujudkan tujuan bernebegara sebagaimana ditetapkan di dalam pembukaan konstitusi. Di antara beberapa kegiatan tersebut, yang paling utama adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal Negara bertindak untuk merumuskan kebijakan, maka dalam konteks ini Negara sedang menjalankan peran sebagai regulator karena Negara sedang merumuskan dan membuat serangkaian tindakan yang salah satunya kemudian dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk regulasi agar kebijakan tersebut mempunyai kekuatan memaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan, sedangkan Negara disebut sebagai menjalankan peran sebagai operator apabila kebijakan atau regulasi sudah ada dan negara melaksanakan regulasi tersebut karena berbagai alasan, (misalnya masyarakat termasuk pelaku ekonomi sedang kesulitan likuiditas atau tidak berminat untuk masuk pada bidang yang diatur, atau karena Negara memandang perlu untuk memberikan standar untuk suatu kegiatan pelayanan tertentu). Selanjutnya kegiatan tersebut dijalankan oleh pihak ketiga yang dapat secara permanen menjalankan sebagian dari peran Negara tersebut dan selanjutnya Negara hanya bertindak untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga tersbut, tanpa harus memainkan sendiri peran tersebut. Negara dalam hal ini harus memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi kewajibannya tersebut. Dibanding peran sebagai regulator, hampir semua peran negara sebagai operator dapat dipihak ketigakan kecuali hal-hal yang bekaitan dengan penjatuhan hukuman, misalnya menjatuhkan hukuman mati dalam rangka melaksanakan undang-undang atau kegiatan lain yang sngat spesifik yang biasanya juga diatur dalam UU.

Isu kelembagaan diberbagai sektor mengenai belum optimalnya hubungan antar lembaga, masih tingginya egosektoral, dan friksi terkait tugas pokok dan fungsi antar lembaga yang “kadang” dirasa *overlap* menimbulkan beban birokrasi tersendiri dan membuat permasalahan pokok yang ingin coba diatasi malah menjadi tidak tertangani dengan optimal akibat malah berkutat dimasalah ego sektoral kelembagaan. Peranan tiap lembaga tentu tidak lepas dari apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang atau regulasi, hal ini menjadi landasan bagi pelaksanaan peran masing-masing lembaga, namun demikian kondisi dan dinamika sosial yang ada membutuhkan respon kebijakan yang tepat dan dinamika sosial, politik, hukum dan ekonomi bergerak demikian cepat sehingga memerlukan respon yang tanggap tidak hanya pemerintah, namun juga akademisi dan pemangku kepentingan di pusat hingga di daerah. Di sisi lain kendala sumber daya manusia perumus kebijakan dan penentu kebijakan kurang memahami urgensi untuk mampu beradaptasi menghadapi tantangan yang ada demikian mengakar sebagai akibat dari pola rutinitas dan pendekatan business as usual dalam menghadapi persoalan yang sebenarnya tidak dapat diatasi dengan pendekatan biasa-biasa saja. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema: “Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045”, dengan mendorong pendekatan yang *not business as usual, feasible* (layak), terintegrasi, *evidence based,* serta akuntabel. Diharapkan hal ini dapat memberikan masukan dari berbagai pihak untuk pelibatan proses perumusan Visi Indonesia 2045.

1. **Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan masukan untuk mengatasi isu nasional yang berkaitan dengan araha kelembagaan yang ideal untuk menyongsong pembangunan jangka menengah 2025 dan visi Indonesia 2045;
2. Memberikan masukan melalui pendekatan yang mendalam, feasible (layak) dan inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan terkait arah kelembagaan yang ideal untuk mendukung berbagai sektor pembangunan.
3. Hasil Seminar ini diharapkan akan menjadi masukan bagi *stakeholder* dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat dalam pilar pembangunan: a). Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, b). Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, c). Pemerataan Pembangunan; dan d). Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan;
4. Mendorong dialog terbuka berdasarkan pendekatan *evidence based policy* terkait berbagai permasalahan pembangunan prioritas dan pilihan kebijakan pembangunan untuk mengatasinya;
5. Sebagai wadah dialog antara pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi, praktisi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional.
6. **Ruang Lingkup kegiatan**
   1. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk forum seminar dalam scope nasional yang dilakukan di jakarta dan didahului melalui *Call For Paper (CFP)* / kompetisi penulisan makalah ilmiah sebagai bahan input bagi Bappenas.
   2. Peserta yang diharapkan yakni: perorangan ataupun tim yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi, mahasiswa/i (S2), peneliti, dan anggota lembaga kajian/NGO.
7. ***Output*/Keluaran**
8. Hasil seminar berupa prosiding Seminar Nasional “Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045”.
9. Jurnal/Terbitan yang dikeluarkan oleh Bappenas dan dipublikasikan.

**BAB II**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam rangka sumbang saran ide dan gagasan dari perspektif kelembagaan dalam penyusunan Visi Indonesia 2045, Bappenas melaksanakan kegiatan kegiatan “*Call for Paper*” yang merupakan bagian dari Rangkaian Acara **Seminar Nasional “Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045”.** Hasil seminar ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan dan tindakan yang tepat dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya dalam **aspek kelembagaan** dalam pilar pembangunan. Adapun 4 pilar pembangunan tersebut, yakni: 1). Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK; 2). Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; 3). Pemerataan Pembangunan; dan 4). Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Pilihan Topik mengacu pada 4 (empat) aspek pilar Visi Indonesia 2045, dengan SUB TOPIK sebagai berikut:

* 1. KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS PENGUASAAN IPTEK

SUB TOPIK:

* + 1. Reformasi Kelembagaan dan Sistem Jaminan Sosial Yang Integratif dan Berkelanjutan
    2. Mengelola Adaptasi dan Kesenjangan Digital dalam Menyiapkan SDM Indonesia yang Responsif terhadap Perubahan di Era Globalisasi (Lapangan Kerja dan Tenaga Kerja)
    3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Vokasi serta Pelatihan Khusus untuk Mendukung Pembangunan dan Kebudayaan Daerah berbasis Triple Helix (Sinergi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat/Pelaku Usaha).
    4. Reformasi Sistem dan Pembiayaan untuk Meningkatkan *Research and Development* (R&D) dalam Pembangunan Ekonomi (Diversifikasi Pendidikan dan Pelatihan Khusus).
  1. KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

SUB TOPIK:

1. Tata Kelola antar Sektor Perekonomian yang Terintegrasi (Ketahanan Energi/Ketahanan Pangan/ Maritim/ Lingkungan Hidup)
2. Ekonomi Kerakyatan di Era Digital (Koperasi dan UMKM)
3. Penataan Peran dan Kelembagaan, serta Sinergi BUMN, BUMD, BUMDes untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Nasional
4. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Digital Ekonomi dan Revolusi Industri
   1. KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN,

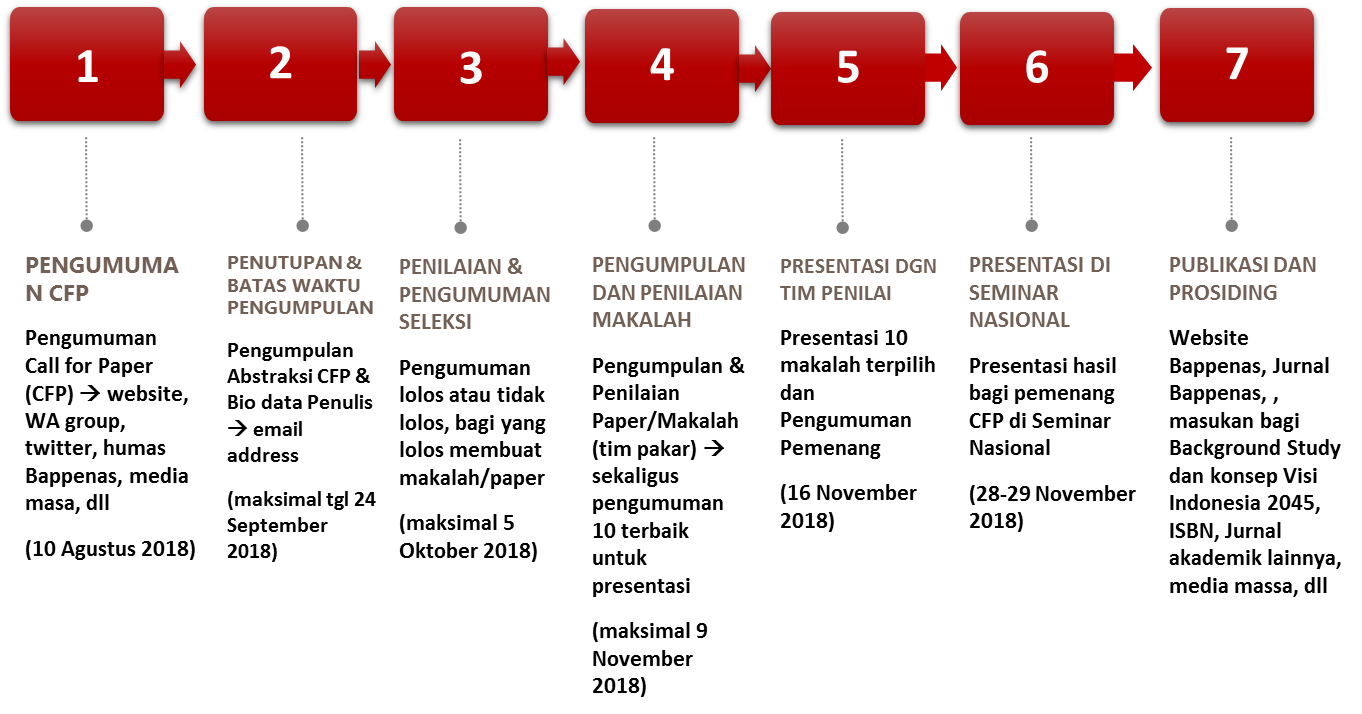
SUB TOPIK:

* + 1. Reformasi Kelembagaan untuk Meningkatkan Sinergi Pusat dan Daerah (birokrasi/restrukturisasi K/L/ data dan Informasi berbasis wilayah).
    2. Sinergi antar Daerah untuk Mendorong Pemerataan Pembangunan di Indonesia (Skema Pembiayaan Afirmatif/ Pembangunan Fisik dan Non Fisik).
    3. Mitigasi dan Manajemen Negara dalam Menanggulangi Bencana
    4. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah.
  1. KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN;

SUB TOPIK:

* + 1. Tata Kelola Keamanan Siber dan Strategi Kontra Narasi Paham Di Era Digital.
    2. Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Demokrasi Substantif (Pembiayaan/Kaderisasi).
    3. Transformasi Kelembagaan Hukum & Pemberantasan Korupsi.
    4. Reformasi Ketatanegaraan (Presidensial dan Parlementer).
    5. Reformasi Sistem dan Kelembagaan Birokrasi dalam Menyongsong *Digital Governance* (kompentensi, budaya dan nilai-nilai).
    6. Sinergi & Tata Kelola Kebijakan dan Regulasi yang Integratif

Alur Proses Call For Papers (CFP):



Adapun kegiatan publikasi dan pendaftaran penerimaan abstrak Call for Paper (CFP) dilaksanakan pada 10 Agustus hingga 25 September 2018, dengan total peserta yang telah mendaftar sebanyak 240 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 143 peserta yang mengirimkan abstraksi (proposal) kepada panitia.

Dari 143 abstraksi yang masuk, dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dengan mekanisme reviu awal oleh tim hingga kemudian tersaring menjadi 50 abstrak terbaik. Hingga batas penutupan pengumpulan makalah lengkap (*paper*) pada 05 November terdapat sebanyak 36 peserta yang mengirimkan makalah lengkap. Pada tahapa selanjutnya seleksi makalah lengkap dilakukan pada 09 November dan berhasil menyaring 10 peserta terbaik yang lolos untuk tahap presentasi didepan tim penilai.

Alur Seleksi CFP:

Panitia Teknis:

|  |  |
| --- | --- |
| Panitia | Uraian Tugas |
| Penanggungjawab | Penanggung Jawab dan Pengarah kegiatan |
| Koordinator | PJ Pelaksanaan dan koordinator kegiatan teknis |
| Sekretaris | * Mendukung persiapan teknis, penyiapan TOR dan draft Agenda * Konfirmasi pembicara /narsum * Menyiapkan draft sambutan dan laporan pelaksanaan * Mendukung keseluruhan persiapan teknis tiap seksi |
| Seksi Acara | Merumuskan dan mengkoordinasikan acara dan agenda detail pra & pelaksanaan, koordinasi dengan humas dll |
| Seksi Bendahara | Mendukung teknis biaya kegiatan (Tim Pakar, honor tim, hadiah CFP, biaya akomodasi peserta CFP, undangan, dll), menyiapkan SK Tim Bappenas dan Universitas |
| Seksi Konsumsi | Mempersiapkan kebutuhan konsumsi pada saat pra (rapat2) dan saat pelaksanaan kegiatan, *goodie bag (toolkit)* |
| Seksi Kesekretariatan | Mendukung teknis kesekretariatan, persuratan, undangan , konfirmasi peserta CFP dan partisipan seminar, pembicara/narsum (registrasi) |
| Seksi Makalah dan Prosiding | * Menyiapkan kriteria detail bagi abstraksi, paper (makalah) * Menyiapkan kisi-kisi atau kriteria penilaian (metode dan skoring) abstrak paper dan pengumpulan abstraksi dan paper * Berkoordinasi dan menfasilitasi, serta mendukung Tim Pakar/penilai (jadwal penilaian, pengumpulan, asistensi * Berkoordinasi dengan pihak eksternal sahli untuk mempublikasikan hasil papar (Jurnal Bappenas, Jurnal Akademik, ISBN, Media Massa, Buku dll) * Note taker saat pelaksanaan kegiatan dan wrap up pelaksanaan kegiatan (summary diakhir sessi) |
| Seksi Dokumentasi dan Publikasi | Menyiapkan sarana dokumentasi, wesbsite, email dan penyerbar luasan kegiatan pada saat Pra dan Pelaksanaan serta mendukung tim Prosiding, sertifikat bagi tim penilai, narasumber, perserta CFP dan partisipan seminar, dan panitia pelaksana |
| Seksi Akomodasi dan Perlengkapan | * Menfasilitasi peserta CFP dan tim pakar, serta undangan * Menyiapkan kebutuhan (stand by: MIC, *Laser point*, batu baterai, *infocus*, kamera, *laptop*) |

Tugas Tim Penilai:

1. Melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh peserta CFP dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pendalaman melalui wawancara kepada para peserta.
3. Menetapkan topik dan sub topik dari peserta yang lolos seleksi untuk dipresentasikan.
4. Sebagai acuan, Tim Penilai akan diberikan konsep Visi Indonesia 2045 dan 2 (dua) pertanyaan kunci dalam TOR.
5. Tim Penilai wajib menghadiri presentasi peserta.
6. Berdasarkan Draft Visi Indonesia 2045, Tim Penilai melakukan analisis Kelembagaan yang ideal menyongsong Indonesia 2045.

Tim Penilai:

1. IR. RADEN PARDEDE, PH.D.
2. PROF. DR. EKO PRASOJO, MAG.RER.PUBL.
3. DR. BAYU KRISNAMURTHI, M.SI.
4. DR. WICIPTO SETIADI, SH.,MH.
5. DR. WILOPO, M.AB
6. DR. DIANI SADIAWATI, SH., L.LM.
7. IR. SLAMET SOEDARSONO, MPP, QIA, CRMP, CGAP.
8. IR. BAMBANG PRIJAMBODO, MA.
9. DR. ONNY NOYORONO, MA, MIA

Kemudian, pada tanggal 16 November 2018 lalu, dari 10 peserta terbaik yang mempresentasikan karyanya di depan Tim Penilai.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HASIL PENILAIAN TOP 10 CFP BAPPENAS 2018)\* | | |
| No. | **Nama** | **Total Score** |
| 1 | **Suprajaka** | **7,82** |
| 2 | **Ahsani Taqwim** | **7,41** |
| 3 | **Rodhiah Umaroh** | **7,21** |
| 4 | **Dody Nur Andriyan** | **7,15** |
| 5 | **Delia Wildianti** | **7,10** |
| 6 | **Sulistyanto Widagdo** | **6,62** |
| 7 | **Dwi Rianisa Mausili** | **6,59** |
| 8 | **Shilvina Widi Irsanti** | **6,49** |
| 9 | **Putu Samawati** | **6,40** |
| 10 | **Risanda Alirastra** | **6,23** |

*)\*Hasil penilaian dari Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat & penilaian detail dari tiap kriteria akan disampaikan melalui email masing-masing peserta*

Selanjutnya kemudian ditetapkan 3 makalah terpilih yang melakukan presentasi pada acara seminar nasional sebagai puncak rangkaian acara. Adapun ketiga judul finalis *Call For Paper* tersebut berdasarkan peringkat penilaian, yakni:

* **Judul pertama,** yaitu : KELEMBAGAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL (JIGN) YANG PERLU DIBENAHI, oleh Sdr. Suprajaka dan Tim sesuai tema terkait Pilar Pemerataan Pembangunan.
* **Judul kedua,** yaitu: KELEMBAGAAN KERJA TERKAIT KETAHANAN PANGAN NASIONAL, oleh Sdri. Rodhiah Umaroh dan Tim. Makalah ini terkait dengan tema Pilar Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.
* **Judul ketiga**, yaitu: KONTRA NARASI TERORISME DI PONDOK PESANTREN, oleh Sdr. Ahsani Taqwim terkait Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Alur Peserta Non Presenter CFP/Partisipan Seminar:

**Pengumuman Pelaksanaan Seminar Nasional**

**(1 Oktober 2018)**

**Registrasi online dan/atau telpon/fax**

**Penutupan Registrasi**

**(22 Novermber 2018)**

**PELAKSANAAN (4 Desember 2018)**

**BAB III**

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Seminar Nasional “Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045”, dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018 di Hotel Borobudur, dalam rangka sumbang saran ide dan gagasan dari perspektif kelembagaan dalam penyusunan Visi Indonesia 2045. Adapun agenda pelaksanaan dari Seminar Nasional tersebut yakni:

**AGENDA SEMINAR NASIONAL**

**“ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045”**

**HOTEL BOROBUDUR, 4 DESEMBER 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Waktu** | **Kegiatan** |
| 1 | 09.30-10.00 | Registrasi Peserta |
| 2 | 10.00-11.00 | Pembukaan   1. Prolog MC 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan Doa 4. Sambutan & Pembukaan 5. Laporan Koordinator Kegiatan   **“Ibu Dr. Diani Sadia Wati (Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas)”**   1. Sambutan Sesmen   **“Bapak Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc (Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas”**   1. Opening Ceremony ( Pemukulan Gong )   **Bapak Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc**  **Ibu Dr. Diani Sadia Wati**  **Bapak Bambang Prijambodo**   1. Keynote Speech   “**Bapak Bambang Prijambodo (Ketua Tim Penyusun Visi Indonesia 2045 Kementerian PPN/Bappenas)”** |
| 3 | 11.00-11.45 | Paparan Pemenang Lomba Call for Paper Bappenas 2018   1. **Pemerataan Pembangunan (Suprajaka dan Tim)** 2. **Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Rodhiah dan Tim)** 3. **Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan** **(Ahsani Taqwim)** |
| 4 | 11.45-12.15 | Diskusi dan Tanya Jawab Peserta CFP |
|  | 12.15-13.15 | Ishoma & Press Conference |
| 5 | 13.15-13.35 | Paparan Narasumber Sesi 1 **“Pilar Pemerataan Pembangunan”**  Narasumber **“Bapak Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa (Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta)”** |
| 6 | 13.35-13.55 | Paparan Narasumber Sesi 2 **“Pilar Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”**  Narasumber **“Bapak Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan., (Peneliti Utama Bidang Agro Ekonomi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)"** |
| 7 | 13.55-14.15 | Paparan Narasumber Sesi 3 **“Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan”**  Narasumber **“Bapak Andhika Chrisnayudhanto., S.IP., S.H., M.A (Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT)”** |
| 8 | 14.15-15.15 | Diskusi dan Tanya Jawab para Narasumber |
| 9 | 15.15-15.30 | Pengumuman Pemenang Lomba CFP dan Pembagian Hadiah |
| 10 | 15.30-16.00 | Penutup   1. Penyampaian Kesimpulan 2. Epilog MC |

Adapun teknis pelaksanaan kegiatan seminar:

1. Acara seminar dibuka oleh Bapak Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan gambaran umum bahwa Bappenas sedang menyusun Visi Indonesia 2015 yang tersusun atas 4 pilar utama: a. Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, b. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, c. Pemerataan Pembangunan, d. Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Pada konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengembangan ekonomi tidak dapat lagi bersifat konsumtif tetapi harus memperhatikan produktivitas serta keberlanjutan dari kegiatan ekonomi. Seminar Nasional ini menjadi wadah untuk mempererat komunikasi dan keterpaduan dengan memanfaatkan simpul jaringan stakeholder pembangunan dengan mekanisme *bottom up* yang lebih terpadu dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang.
2. Adapun *Keynote Speech* Seminar disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur sekaligus Ketua Tim Penyusunan Visi Indonesia 2045.
3. Pada sesi selanjutnya, yakni Paparan dari ke-3 peserta terbaik pemenang *Call for Paper* yakni (secara urutan pemenang):
4. Judul yang diangkat terkait Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang perlu dibenahi, oleh Sdr. Suprajaka dan Tim dengan tema terkait Pilar Pemerataan Wilayah. Menurutnya, data geospasial yang yang tepat dan saling terintegrasi, akan sangat membantu Pemerintah dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan kondisi dan karakter daerahnya masing-masing. Kebijakan 1 peta yang diusulkan juga sangat baik, mengingat masih ada 14 provinsi dari 34 provinsi yang belum memiliki data geospasial yang komprehensif. Dengan adanya data geospasial yang baik, Pemerintah akan terbantu dalam peningkatan pemerataan pembangunan di Indonesia.
5. Judul yang diangkat yaitu terkait Kontra Narasi Terorisme di Pondok Pesantren, oleh Sdr. Ahsani Taqwim sesuai tema terkait Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Menurut tim penilai, tulisan ini cukup baik dan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas Indonesia kedepan, khususnya terkait dengan penanggulangan terorisme. Sehingga topik ini masih relevan untuk dibahas kedepan.
6. Judul yang diangkat yaitu mengenai Kelembagaan Kerja terkait Ketahanan Pangan Nasional, oleh Sdri.Rodhiah Umaroh dan Tim dengan tema terkait Pilar Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. Tulisan ini dinilai menarik, karena penulis berusaha mengaitkan Ketahanan Pangan dengan *Political Rights* dan *Civil Liberties*, selain itu kedepan Indonesia juga akan tetap memiliki perhatian yang cukup signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
7. Sessi selanjutnya, yakni pemaparan secara panel oleh para narasumber yang terkait bidang keilmuan dan/atau kepakaran dengan beberapa Pilar serta konteks dari Visi Indonesia 2045. Adapun pakar dimaksud yakni:
8. “Pilar Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” Narasumber: “Bapak Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, (Peneliti Utama Bidang Agro Ekonomi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)”;
9. “Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan” Narasumber: “Bapak Andhika Chrisnayudhanto., S.IP., S.H., M.A (Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT)”.
10. Adapun yang hadir total 131 orang peserta dalam acara seminar nasional tersebut, dengan rincian yakni:

* Perwakilan K/L : 57 orang
* Perguruan Tinggi : 58 orang
* NGO/LSM : 6 orang
* Asosiasi : 7 orang
* BUMN : 2 orang
* Media/Pers : 2 orang

Adapun sebagai rencana tindak lanjut kedepan, 3 peserta juara diminta menyempurnakan tulisannya sesuai dengan masukan Tim Penilai dan bagi 10 makalah terbaik akan dipublikasikan dalam prosiding seminar, serta bagi 3 makalah terbaik akan publikasikan dalam jurnal ilmiah di internal Bappenas (sesuai proses yang ditentukan lembaga terkait).

**BAB IV**

**PENUTUP**

Demikian seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak proses pra pelaksanaan, pelaksanaan hingga proses pasca pelaksanaan dilakukan dengan seoptimal mungkin. Kendala rentang waktu persiapan yang demikian singkat dari waktu penerimaan anggaran kegiatan diupayakan diatasi dengan berbagai persiapan substansi dan teknis yang seefektif mungkin dengan organisasi kepanitiaan baik internal Bappenas maupun para pakar yang turut mendukung pelaksanaan rangkaian seminar nasional ini mulai dari CFP hingga puncak acara seminar.

Masukan dan sumbangsih ide dan gagasan dari berbagai pihak dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan dan kebijakan merupakan sarana teknokratik yang tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi Bappenas sebagai lembaga think-tank dan perencanaan pembangunan. Selain itu seminar ini diharapkan merupakan sebuah saluran untuk masyarakat (akademisi, lembaga kajian, ASN dan juga berbagai pihak yang berkompeten) untuk memberikan gagasannya, dimana peran Bappenas mendorong adanya pendekatan bottom up process dalam perencanaan pembangunan adalah agar timbul ownership dan partisipatif dalam setiap perencanaan kebijakan pembangunan dari level jangka panjang (visi misi ataupun RPJPN), jangka menengah hingga jangka pendek tahunan. Kami menyadari sepenuhnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menggerakan roda pembangunan, dibutuhkan upaya bersama dan kerjasama dan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam menangani berbagai tantangan pembangunan. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi dalam menyusun dan merumuskan suatu kebijakan agar memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sedikit sumbangsih wacana dan ide strategis bagi berbagai sektor, baik di internal Pemerintah maupun juga bagi berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya.

**LAMPIRAN**

* 1. TOR dan RAB Kegiatan
  2. SK Tim Pelaksana Kegiatan
  3. Hasil Kegiatan (Makalah 10 finalis CFP)
  4. Dokumentasi (pra-seminar dan pelaksanaan seminar)

1. Konsep Visi Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur dan Impian Indonesia 2015 – 2085. Bappenas, 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP\_2005-2025.pdf , hlm. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
4. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, Loc.cit, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, Loc.cit, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. 7Didi Rasidi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bagian Perencanaan*. “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”,*<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn>, 14 Agustus 2011. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8Benediktus Panji Pradipta, Kompasiana.com, *“Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengemukakan Pendapat”,* <https://www.kompasiana.com/bpanjipradipta/hak-kebebasan-berserikat-berkumpul-dan-mengemukakan-pendapat_54f5e2cfa33311dd6d8b461d>, 18 Juni 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9Ibid. [↑](#footnote-ref-9)